

TESIS

KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BANYUASIN



**AMBARWATI
07022682125008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

TESIS

KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BANYUASIN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains (M.Si)
pada
Program Studi Magister Sosiologi
Bidang Kajian Utama Pemberdayaan Masyarakat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



AMBARWATI
07022682125008

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BANYUASIN

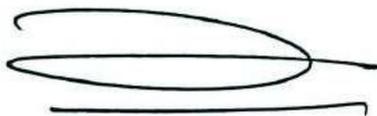
Oleh:

AMBARWATI
07022682125008

Palembang, Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Alfitri, M. Si.
NIP. 19660122 199003 1 004



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si.
NIP. 19800211 200312 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M. Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BANYUASIN" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Tesis Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 25 Juli 2025.

Palembang, Juli 2025

Ketua:

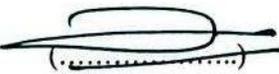
- 1 Prof. Dr. M. Ridhah Taqwa., M.Si.
NIP. 19661231 199303 1 018



(.....)

Anggota:

- 2 Prof. Dr. Alfitri, M. Si.
NIP. 19660122 199003 1 004
- 3 Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si.
NIP. 19800211 200312 2 003
- 4 Dr. Dadang Hikmah Purnama., M.Hum.
NIP. 19650712 199303 1 003
- 5 Dr. Zulfikri Suleman, M.A.



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Koordinator Program Studi,
Magister Sosiologi



Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP. 19650712 199303 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMBARWATI
NIM : 07022682125008
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuasin, 08 April 1997
Program Studi : Magister Sosiologi
Bidang Kajian Utama : Pemberdayaan Masyarakat
Judul Tesis : KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BANYUASIN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. **Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.**
2. **Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.**

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 10 September 2025

Yang membuat pernyataan,



Ambarwati

NIM. 07022682125008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMBARWATI
NIM : 07022682125008
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuasin, 08 April 1997
Program Studi : Magister Sosiologi
Bidang Kajian Utama : Pemberdayaan Masyarakat
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Sosiologi **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BANYUASIN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Sosiologi berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang Pada
Tanggal : 10 September 2025
Yang Menyatakan



Ambarwati
NIM. 07022682125008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“What Doesn’t kill you, makes you stronger”
(Friedrich Nietzsche)

“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata”
(Pablo Picasso)

Kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Bak dan Mikku Tercinta**
- **Saudara dan Keluargaku**
- **Dosen Pembimbingku**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamiin

Segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan Judul **“KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BANYUASIN”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana S-2 dalam bidang ilmu Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sholawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad ﷺ, Beserta keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut setia hingga akhir zaman semoga kelak kita akan mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Mahsyar, Aaamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis tidak menutup diri terhadap kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT tuhan yg maha kuasa yang selalu memberikan pertolongan dan petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin
2. Kedua orang tua yang sudah memberikan dukungan baik dalam bentuk doa dan motivasi
3. Adik-adik yang telah memberikan dukungan dan menjadikan motivasi bagi penulis.
4. Abang yang telah mendukung penulis menyelesaikan studi baik secara moril dan materil.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

8. Prof. Dr. Alfitri, M.Si Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini
9. Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si Dosen Pembimbing 2 yang sudah memberikan bimbingan, saran dan masukan untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini
10. Seluruh dosen magister sosiologi yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan di sosiologi unsri
11. Mbak Yulianis, M.Si admin magister sosiologi yang sudah memberikan kemudahan dan bantuan dalam urusan administrasi selama proses perkuliahan
12. Bapak Dr. Tetra Destorie Imantoro A.Md., IP., S.Sos., M.H kepala lembaga pemasyarakatan kelas II Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Banyuasin serta bantuannya dalam melengkapi data-data terkait gambaran umum lokasi penelitian
13. Seluruh staff dan informan lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Banyuasin yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
14. Teman teman seperjuangan magister sosiologi yang telah memberi dukungan, berbagi ilmu dan pengalaman
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga amal serta kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dapat diterima dan dibalas kebaikannya oleh Allah ﷻ.

Palembang, Juli 2025
Penulis,

Ambarwati

**KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KABUPATEN BANYUASIN**

AMBARWATI
07022682125008

Program Studi Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana kasus asusila (pelaku kekerasan seksual) selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Kekerasan simbolik, sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, merupakan bentuk kekuasaan yang tersembunyi dan tidak disadari oleh korban, yang muncul melalui tindakan verbal, sikap, perlakuan, dan struktur sosial yang secara tidak langsung menindas dan menciptakan ketimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi data, yaitu melalui wawancara mendalam terhadap narapidana asusila, petugas lapas, dan narapidana non-asusila; observasi langsung terhadap interaksi sosial di dalam lapas; serta analisis dokumen dan arsip yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai pengalaman kekerasan simbolik yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana asusila mengalami berbagai bentuk kekerasan simbolik seperti stigma sosial yang dilekatkan secara terus-menerus, pemanggilan dengan istilah merendahkan, pembatasan interaksi sosial, serta diskriminasi tidak langsung dari petugas maupun narapidana lain. Kekerasan simbolik ini berdampak pada perasaan terasing, rendah diri, serta kesulitan dalam mengikuti program pembinaan dan reintegrasi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan masih mereproduksi kekuasaan simbolik yang memperparah posisi subordinat kelompok tertentu, khususnya pelaku asusila. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pembinaan narapidana, pelatihan sensitisasi bagi petugas, serta penguatan sistem pengawasan terhadap bentuk kekerasan non-fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Kekerasan simbolik, Narapidana Asusila, Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin

**SYMBOLIC VIOLENCE AGAINST SEXUAL OFFENDERS
IN CLASS II A CORRECTIONAL FACILITY
BANYUASIN REGENCY**

AMBARWATI
07022682125008

Department Master of Sociology
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University

ABSTRACT

This study aims to reveal and analyze the forms of symbolic violence experienced by immoral convicts (perpetrators of sexual violence) while serving their sentences in correctional institutions. Symbolic violence, as stated by Pierre Bourdieu, is a form of power that is hidden and not realized by the victim, which appears through verbal actions, attitudes, treatments, and social structures that indirectly oppress and create inequality. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques are carried out by data triangulation, namely through in-depth interviews with immoral convicts, prison officers, and non-immoral convicts; direct observation of social interactions in prison; and analysis of relevant documents and archives. This approach was chosen to obtain a complete and in-depth understanding of the experience of symbolic violence experienced by the research subjects. The results of the study show that immoral prisoners experience various forms of symbolic violence such as continuous social stigma, being called derogatory terms, restrictions on social interaction, and indirect discrimination from officers and other prisoners. This symbolic violence has an impact on feelings of alienation, low self-esteem, and difficulty in participating in social development and reintegration programs. These findings indicate that the correctional system still reproduces symbolic power that worsens the subordinate position of certain groups, especially perpetrators of immorality. This study recommends the need for a more inclusive approach in the development of prisoners, sensitization training for officers, and strengthening the monitoring system for forms of non-physical violence in correctional institutions.

Keywords: Symbolic violence, Immoral convicts, Banyuasin Penitentiary

RINGKASAN

KEKERASAN SIMBOLIK PADA NARAPIDANA ASUSILA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BANYUASIN

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, Juli 2025

Ambarwati, dibimbing oleh Prof. Dr. Alfitri, M.Si dan

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
xxix + 200 Halaman, 6 Tabel, 19 Gambar, Lampiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena diskriminasi dan stigma yang dialami narapidana kasus asusila di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kabupaten Banyuasin. Narapidana asusila menempati posisi sosial paling rendah di dalam hierarki sosial lapas, sehingga rentan mengalami perlakuan diskriminatif. Kekerasan yang dialami tidak selalu berbentuk fisik, tetapi seringkali hadir sebagai kekerasan simbolik berupa stigma, pelabelan negatif, pengucilan, serta diskriminasi dalam akses pembinaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kehidupan sehari-hari narapidana asusila, menganalisis bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang mereka alami, serta menelaah penyebab terjadinya dominasi tersebut melalui kerangka teori Pierre Bourdieu mengenai habitus, modal, dan arena. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana asusila menghadapi beragam bentuk kekerasan simbolik, antara lain:

1. Pengucilan sosial dan eksklusi dalam kegiatan bersama.
2. Pelabelan negatif dengan sebutan merendahkan seperti “penjahat kelamin.”
3. Penggunaan bahasa merendahkan dalam interaksi sehari-hari.
4. Diskriminasi sistemik dari petugas maupun sesama narapidana.
5. Intimidasi tidak langsung hingga pemaksaan menyembunyikan identitas kasus mereka.

Penyebab utama kekerasan simbolik ini mencakup stigma sosial ekstrem, hierarki sosial internal lapas, budaya maskulinitas toksik, peran petugas yang bias, serta ketiadaan regulasi perlindungan khusus. Akibatnya, narapidana asusila mengalami rasa terasing, rendah diri, depresi, dan kesulitan mengikuti program pembinaan serta reintegrasi sosial.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem pemasyarakatan masih mereproduksi kekuasaan simbolik yang memperkuat posisi subordinat narapidana asusila. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya pembinaan yang lebih inklusif, pelatihan sensitisasi bagi petugas, serta pengawasan khusus terhadap bentuk kekerasan non-fisik. Dengan demikian, Lapas dapat lebih efektif menjalankan fungsinya sebagai lembaga rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar tempat hukuman.

SUMMARY

SYMBOLIC VIOLENCE AGAINST SEXUAL OFFENDERS IN CLASS II A CORRECTIONAL FACILITY, BANYUASIN REGENCY

Scientific paper in the form of a Thesis, July 2025

Ambarwati, supervised by Prof. Dr. Alfitri, M.Si and

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

Master of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University
xxix + 200 Pages, 6 Tables, 19 Figures, Appendices

This study examines the phenomenon of discrimination and stigma experienced by immoral convicts in Class II A Correctional Facility, Banyuasin Regency. These prisoners occupy the lowest social position within the prison hierarchy, making them highly vulnerable to discriminatory treatment. The violence they experience is not always physical, but often manifests as symbolic violence, such as stigma, negative labeling, exclusion, and discrimination in access to rehabilitation programs.

The research aims to uncover the daily life of immoral convicts, analyze the forms of symbolic violence they endure, and explore the causes of such domination through Pierre Bourdieu's framework of habitus, capital, and field. The study employs a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis.

Findings reveal that immoral convicts face various forms of symbolic violence, including:

1. Social exclusion from group activities.
2. Negative labeling with derogatory terms such as "sex offender."
3. Derogatory language in daily interactions.
4. Systemic discrimination from both officers and fellow inmates.
5. Indirect intimidation and the forced concealment of their criminal identity.

The main causes of symbolic violence include extreme social stigma, internal prison hierarchy, toxic masculinity culture, biased attitudes of correctional officers, and the absence of special protection regulations. Consequently, immoral convicts experience alienation, low self-esteem, depression, and difficulties in joining rehabilitation and reintegration programs.

The study concludes that the correctional system continues to reproduce symbolic power that reinforces the subordinate position of immoral convicts. It recommends more inclusive rehabilitation approaches, sensitization training for prison officers, and stronger monitoring of non-physical violence. Thus, correctional facilities can better fulfill their role as institutions of rehabilitation and social reintegration, rather than merely places of punishment.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSRTUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
RINGKASAN	xvii
SUMMARY	xix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.2.1 Lembaga Per masyarakatan.....	26
2.2.2 Pengertian Narapidana	28
2.2.3 Hak-hak Narapidana	29
2.3 Kekerasan Simbolik.....	30
2.4 Kehidupan Sosial Penjara dan Budaya Penjara	42
2.5 Bagan Kerangka Pemikiran	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Desain Penelitian	57
3.2 Lokasi Penelitian	57
3.3 Strategi Penelitian	58
3.4 Fokus Penelitian.....	59
3.5 Sumber Data	60
3.5.1 Data Primer	60

3.5.2	Data Sekunder	61
3.6	Penentuan Informan.....	61
3.7	Peranan Peneliti	62
3.8	Unit Analisis Data.....	62
3.9	Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.9.1	Pengamatan/observasi	63
3.9.2	Wawancara.....	63
3.9.3	Dokumentasi.....	63
3.10	Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	64
3.11	Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		67
4.1	Gambaran Umum Lapas.....	67
4.2	Tugas Pemasarakatan & Prosedur Tetap.....	69
4.3	Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas IIA Banyuasin.....	71
4.4	Sarana dan Prasarana LAPAS Kelas IIA Banyuasin.....	75
4.5	Jumlah Narapidana Lembaga Pemasarakatan Banyuasin Kelas IIA Pada Tahun 2024.....	80
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		81
5.1	Kehidupan keseharian narapidana asusila selama menjalani hukuman di lembaga pemasarakatan II A Kabupaten Banyuasin	81
5.1.2	Rutinitas Harian yang Terstruktur: Mesin Waktu dalam Dinding Penjara .	82
5.1.3	Interaksi Sosial dan Dinamika Komunitas: Sebuah Ekosistem Tertutup ...	85
5.1.4	Aspek Psikologis dan Emosional.....	87
5.1.5	Kultur Kehidupan dalam Lapas: Norma dan Nilai yang Tak Tertulis.....	88
5.2	Macam-macam jenis kekerasan simbolik yang dialami oleh pelaku kekerasan seksual di penjara	97
5.2.1	Pengucilan Sosial (Sosial Eksklusi).....	97
5.2.2	Pelabelan Negatif.....	104
5.2.3	Penggunaan Bahasa yang Merendahkan.....	107
5.2.4	Diskriminasi Sistemik.....	109
5.2.5	Intimidasi Tidak Langsung	111
5.2.6	Pemaksaan Menyembunyikan Identitas.....	113
5.3	Penyebab Kekerasan Simbolik Terhadap Narapidana Asusila	117
5.3.1	Stigma Sosial Ekstrem	119
5.3.2	Struktur Hierarki Sosial di Penjara	120

5.3.3Budaya Kekerasan dan Maskulinitas Toksik.....	122
5.3.4Peran Petugas yang Bias	123
5.3.5Kurangnya Kesadaran HAM.....	125
5.3.6Tidak Adanya Regulasi Perlindungan Khusus	126
5.4 Kekerasan Simbolik Terkait (Modal, Habitus dan Arena) di Lapas	127
5.4.1Modal: Akar Ketimpangan dalam Relasi Sosial Lapas	127
5.4.2Habitus: Ketundukan yang Tercipta secara Tak Sadar	132
5.4.3Arena Sebagai Medan Kekuasaan	136
5.4.4Bentuk-bentuk Kekerasan Simbolik yang dialami oleh Narapidanan seksual dilembaga pemasyarakatan Banyuasin Kelas IIA.....	143
5.4.5 Sebab Adanya Kekerasan Simbolik Terhadap Narapidana Asusila.....	147
5.4.6 Dinamika Kekerasan Simbolik Melalui (Modal,Kuasa Simbolik dan Habitus) di Lapas	149
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	145
6.1. Kesimpulan.....	155
6.2. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	164

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	59
Tabel 4. 1 Sarana dan Prasarana Lapas Kelas IIA Banyuasin	75
Tabel 4. 2 Jadwal Rutin Aktivitas Lapas	77
Tabel 4. 3 Daftar Menu Makanan.....	79
Tabel 5. 1 Temuan Kekerasan Simbolik	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4. 1 Bagan Tugas Pemasyarakatan	70
Gambar 4. 2 Bagan Struktur Kepimpinan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Banyuasin	74
Gambar 4. 3 Kamar Asrama Lapas Tampak Dalam.....	76
Gambar 4. 4 Ruang Tunggu Besuk Keluarga Narapidana	76
Gambar 4. 5 Gerbang Antar Asrama Narapidana.....	76
Gambar 4. 6 Foto Bersama Kalapas dan Jajaran Lapas Kelas IIA Banyuasin	77
Gambar 5. 1 Wawancara Bersama Narapidana Asusila	86
Gambar 5. 2 Wawancara Bersama Narapidana Kasus Lain.....	88
Gambar 5. 3 Arahan Lapas Kepada Tahanan Pendamping yang Bertugas Sebagai Panitia Acara 17 Agustus 2024	90
Gambar 5. 4 Wawancara Bersama Sipir Lapas Banyuasin Kelas IIA.....	91
Gambar 5. 5 Wawancara Bersama Bapak BN (Pelaku Asusila)	93
Gambar 5. 6 Ruang Strap Isolasi Narapidana.....	94
Gambar 5. 7 Wawancara Bersama Bapak RS	96
Gambar 5. 8 Wawancara Dengan Bapak AR	97
Gambar 5. 9 Wawancara Bersama Petugas Lapas.....	98
Gambar 5. 10 Wawancara Bersama Napi Asusila.....	100
Gambar 5. 11 Wawancara Bersama Narapidana Asusila	102
Gambar 5. 12 Wawancara Bersama Bapak AD (Petugas Lapas).....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tanggung jawab untuk membina narapidana secara manusiawi dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Dalam praktiknya, lembaga ini seharusnya menciptakan suasana pembinaan yang kondusif, berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hukuman yang diberikan pada narapidana semata-mata ditujukan agar dapat memberikan rasa jera dan sekaligus sebagai upaya guna membuat narapidana yang melanggar tersebut menjadi sadar akan kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri narapidana. Dengan tujuan tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dilihat sebagai lembaga pemberian sanksi yang semata-mata hanya memberikan hukuman saja melainkan juga ditujukan sebagai lembaga pendidikan khusus.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa berbagai bentuk ketidakadilan masih terjadi di dalam Lapas. faktanya masih saja ada narapidana yang belum merasakan perlindungan selama masa penahanannya dalam lembaga pemasyarakatan. Kekerasan antar pelaku kejahatan dalam penjara atau biasa disebut dengan seakan telah menjadi yang biasa terjadi di dalam tahanan antar tahanan maupun oleh petugas keamanan. Bentuk kekerasan yang tidak terlihat secara fisik biasa disebut kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik merupakan salah satu bentuk dominasi sosial yang tidak disadari secara langsung, tetapi memiliki dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Bourdieu (1992) menyatakan bahwa kekerasan simbolik adalah “bentuk kekuasaan yang halus, tidak kasat mata, dan bekerja melalui struktur makna serta sistem simbol yang diterima oleh pihak yang didominasi tanpa paksaan fisik.” Dalam konteks pemasyarakatan, kekerasan simbolik ini tampak dalam bentuk stigma, pelabelan, serta perlakuan diskriminatif terhadap narapidana tertentu, terutama narapidana kasus asusila. Narapidana kasus asusila berada dalam posisi yang sangat rentan dalam hierarki sosial internal Lapas. Mereka sering kali mendapat perlakuan hina, dijauhi oleh narapidana lain, tidak dilibatkan dalam

aktivitas bersama, dan dilabeli dengan istilah kasar seperti “penjahat kelamin” atau “banci” (Ricciardelli & Spencer, 2014). Perlakuan ini tidak hanya mencerminkan kebencian personal, tetapi juga merupakan ekspresi dari kekuasaan simbolik yang dilegitimasi oleh norma sosial internal penjara.

Menurut Van den Berg (2018), pelaku kejahatan seksual di dalam Lapas menghadapi isolasi sosial yang sistematis, baik dari petugas maupun sesama narapidana, sebagai bentuk hukuman sosial tambahan yang tidak ditetapkan dalam sistem hukum formal. Isolasi ini bukan hanya bentuk hukuman moral informal, tetapi juga berperan memperkuat stigma dan memperlemah hak-hak sosial mereka di dalam Lapas.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara pada salah satu petugas di lembaga pemasyarakatan yaitu mas MH yang bertugas sebagai pengelola pembinaan bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan dan juga sebagai wakil Pemasyarakatan pada hari Rabu, 3 Juli 2024 ditemukan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi berupa informasi yang simpang siur, sebagai contoh adanya perkelahian dalam satu sel tahanan bahwa sampai penyimpangan seksual yang dilakukan pernah terjadi baik yang diketahui maupun tidak oleh petugas di lembaga pemasyarakatan Banyuasin Kelas II ini. Namun mas MH menambahi melalui pengakuannya pernah ada tahanan narapidana pelaku pemerkosaan berinisial DH yang di bulan februari kemarin telah bebas hukuman tahanan memberikan informasi padanya tentang pengalamannya mendapatkan perlakuan kasar dari narapidana lainnya, sebagai berikut ini:

“kemarin di bulan februari saya sempat ngobrol dengan napi yang sekarang sudah bebas, napi itu cerita pada waktu pertama dia masuk sudah sering di katain predator di bully dengan sapaan penjahat kelamin, di jadikan lelucon yang tidak mengenakan hati oleh teman satu ruang sel dan dia harus bertahan pada waktu itu. Pokoknya dak enak nian disano katonyo. Hampir tiap hari mendapatkan perlakuan yang dak enak dari para napi karena dia katanya pelaku pencabulan. Ada juga tahun 2022 ada napi kasus pemerkosaan mengalami despresi stres dulunya karena disiksa, di caci dan dikucilkan di Lapas karena kasus perkosaan. Kalo mereka yang kasusnya perkosaan, sering di-bully di Lapas.

(Sumber: Wawancara Bersama mas MH, Rabu, 3 Juli 2024)

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan tepat dan jauh dari kenyataan idealnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran atau bahkan kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan yang belum diketahui secara umum bahkan oleh para petugas di lembaga pemasyarakatan sendiri khususnya.

Kekerasan erat kaitannya dengan tindakan penyerangan yang melibatkan kontak fisik sehingga dapat melukai korban, baik itu secara fisik maupun psikis. Kekerasan secara simbolik yang bertujuan untuk mengkonstruksi suatu objek atau realita dalam masyarakat lalu menurut Bourdieu kekuasaan simbolik merupakan suatu kekuasaan untuk mengonstruksi realitas melalui tatanan *Genoseological*, yaitu pemaknaan yang paling dekat mengenai dunia sosial suatu kelompok atau orang. Kekerasan simbolik (Bourdieu, 2011) beroperasi melalui prinsip simbol yang diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang mendominasi dan pihak yang didominasi. Diantaranya adalah bahasa, gaya hidup, cara berpikir, cara berbicara, hingga cara bertindak.

Kekerasan simbolik menciptakan sebuah mekanisme sosial yakni mereka yang dikuasai menerimanya begitu saja. Mekanisme sosial yang bersifat objektif memengaruhi kekerasan simbolik untuk memanfaatkan simbol-simbol yang ada demi memenuhi fungsi politik, yaitu kehendak untuk berkuasa. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen kuasa yang memanfaatkan mekanisme kekerasan simbolik, baik melalui ungkapan, wacana, teks, tanda, slogan ataupun simbol lainnya. Haryatmoko (2003) menyatakan bahwa kekerasan simbolik merupakan serangkaian bentuk kekerasan yang sifatnya laten (tersembunyi), seperti pelencengan, pemaksaan simbol, dan distorsi. Praktik kekerasan simbolik ini sering kali ditunjukkan dalam percakapan dengan kata-kata menyinggung, merendahkan, membandingkan, *stereotype*, sebuah olok-olokan bahkan jargon yang tidak pantas lalu kekerasan simbolik dapat juga dikatakan kekerasan yang merupakan aktivitas intelektual untuk mengkondisikan olah pikir pihak lain sehingga berbagai bentuk kekerasan menjadi sah dan bahkan diperlukan. Karena bekerja pada level olah pikir, korban tidak merasa mengalami kekerasan sehingga kekerasan fisik maupun psikologis menjadi sah dan diterima sukarela (Marsana, 2000: 15). Manakala

konstruksi realitas media berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat, maka hakikatnya telah terjadi kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik bisa mewujudkan melalui penggunaan bahasa penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta. Kekerasan simbolik tidak hanya beroperasi lewat bahasa. Namun juga terjadi pada isi bahasa (*language content*) itu sendiri yakni pada apa yang diucapkan, disampaikan atau diekspresikan (Sobur, 2009).

Masih banyaknya tingkat kekerasan yang dilakukan sesama narapidana terutama bagi mereka yang perkaranya adalah perkosaan yang menurut pandangan narapidana lain dalam lembaga pemasyarakatan adalah perkara "*Banci nian, beraninyo samo cewek dan budak kecil bae*", sehingga banyak perlakuan diskriminatif dan kekerasan bahkan penganiayaan yang dialami di dalam lembaga pemasyarakatan

Sebagai perbandingan, penganiayaan terhadap pelaku perkosaan juga terjadi di rumah tahanan Polres Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan berinisial AP 28 Tahun. Korban mengalami kekerasan berupa penganiayaan yang berat di sekujur tubuhnya walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong. Informasi yang didapatkan dari para sakri bahwa AP dianiayaan oleh beberapa tahanan lepas yang sudah lama mendekam di rutan polres tersebut, adapun motif penganiayaan itu sendiri terungkap dari pengkuan 3 tersangka sebelum mereka melakukan penganiayaan mereka sering "*membully*" korban dengan menyuruh untuk tidur dipojokan toilet dan tidak boleh bersama napi lainnya dan lama kelamaan mungkin mereka semakin geram dengan AP yang melakukan perkosaan pada anaknya sendiri sehingga mereka ingin memberikan pelajaran "*pelocoan*" pada AP namun nampaknya penyiksaan yang mereka lakukan mengenai organ vital AP sehingga AP tidak sadarkan diri lalu meninggal dunia di Rumah sakit. Perlakuan yang sama juga dialami oleh narapidana lainnya yang melakukan tindak pidana perkosaan atau asusila. Penganiayaan yang dialami jauh lebih parah jika korban yang didapati adalah anak-anak, umumnya narapidana lain memperlakukannya dengan memberikan balsam atau minyak gosok pada kemaluannya atau dengan memberikan pemberat pada alat kelamin dan diperintahkan untuk berlari-lari di dalam sel bahkan sampai tidur di kamar mandi.

Adanya perlakuan kekerasan yang dialami oleh narapidana yang melakukan

tindak pidana perkosaan atau asusila yang dilakukan narapidana lain di dalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa di satu sisi kepentingan korban dan masyarakat sebagai korban telah diwakili oleh negara dengan memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku, namun faktanya pelaku perkosaan kembali mengalami stigma yang kedua di dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana lainnya. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kehidupan keseharian narapidana asusila selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas II Banyuasin dan bagaimana terjadinya kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana asusila di lembaga pemasyarakatan kelas II A banyuasin mengapa narapidana pelaku asusila cenderung mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan simbolik di lembaga pemasyarakatan Banyuasin dengan melihat dari segi pendekatan kekuasaan simbolik yang merupakan metode pembacaan tindakan sosial secara keseluruhan sehingga apa yang ada dibalik sebuah menjadi jelas terlihat. Untuk melihat tingginya kekerasan simbolik yang dialami oleh para narapidana menurut Bourdieu (1992), kekerasan simbolik adalah kekuasaan yang dapat dikendali dari tujuannya untuk mendapatkan pengakuan. Artinya, kekuasaan (baik ekonomi, politik, budaya, atau lainnya) yang memiliki kemampuan untuk tidak dapat dikenali bentuk aslinya, kekerasannya, atau kesewenang-wenangannya.

Kekerasan simbolik bekerja dengan mekanisme penyembunyian kekerasan yang dimiliki dan menjadi sesuatu yang diterima sebagai yang memang harusnya demikian menurut Bourdieu itu adalah *doxa*. Keberadaan *doxa* diperoleh melalui proses penamaan yang berlangsung terus menerus. Pelaku sosial pun menerima kekerasan simbolik sebagai sesuatu yang wajar karena kekerasan simbolik menggunakan struktur objektif yang ada di dalam dunia sosial Bourdieu itu adalah *doxa*. Keberadaan *doxa* diperoleh melalui proses penamaan yang berlangsung terus menerus. Dalam teori sosiologi Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik adalah bentuk kekuasaan yang tersembunyi, halus, dan tidak disadari, tetapi sangat efektif dalam mempertahankan dominasi sosial. Kekuasaan ini tidak dijalankan melalui paksaan fisik, melainkan melalui simbol, bahasa, norma, dan nilai budaya yang dianggap sah dan wajar oleh masyarakat. Karena tidak tampak sebagai kekerasan, kekerasan simbolik sering kali tidak ditentang, bahkan diterima dan direproduksi oleh mereka yang menjadi korban.

Kekerasan simbolik bekerja melalui struktur sosial yang disebut struktur objektif, yakni susunan relasi sosial yang ada secara nyata dalam masyarakat, seperti kelas sosial, pendidikan, bahasa, dan akses terhadap sumber daya. Struktur ini menciptakan kondisi ketimpangan dan dominasi, tetapi tampak sebagai bagian "alami" dari kehidupan sosial. Misalnya, orang yang berasal dari kelas bawah cenderung memiliki akses pendidikan yang lebih rendah, namun mereka menerima kenyataan ini seolah itu adalah akibat dari kurangnya kemampuan atau kerja. Dengan demikian, pelaku sosial menerima kekerasan simbolik sebagai sesuatu yang wajar bukan karena mereka bodoh atau pasrah, melainkan karena kekerasan simbolik bekerja melalui mekanisme yang tidak tampak sebagai kekerasan, yaitu melalui struktur sosial yang objektif dan keyakinan yang dianggap normal (*doxa*) (Bourdieu, 1992).

Kekuasaan ini berjalan tanpa perlawanan karena masyarakat telah menginternalisasi sistem dominasi sebagai bagian dari tatanan yang sah. Padahal dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi negara yang memiliki fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau narapidana. Tujuan utama dari pembinaan tersebut adalah untuk mempersiapkan narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Dalam idealnya, Lapas adalah tempat rehabilitasi sosial, tempat individu yang melanggar hukum dibimbing agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun dalam realitas yang terjadi di lapangan, fungsi pembinaan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya (Sudarto, 2020). Salah satu problematika serius yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah terjadinya kekerasan baik fisik, verbal, maupun simbolik yang dialami oleh para narapidana di dalam Lapas. Dari berbagai bentuk kekerasan tersebut, kekerasan simbolik merupakan bentuk yang paling tidak kentara, namun sangat membekas secara psikologis dan sosial. Kekerasan simbolik ini sangat relevan untuk dikaji, terutama terhadap kelompok narapidana yang menduduki posisi sosial paling rendah dan kerap distigmatisasi, yaitu narapidana kasus asusila, seperti pelaku kekerasan seksual, pelecehan terhadap anak, atau tindakan asusila lainnya.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin, sebagaimana di banyak

Lapas lainnya, narapidana asusila sering kali ditempatkan dalam posisi yang rentan, terpinggirkan, dan menjadi objek stigma sosial yang berat. Mereka tidak hanya dihukum oleh sistem hukum negara, tetapi juga oleh sistem sosial yang berlaku di dalam Lapas. Perlakuan diskriminatif tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk: pengucilan dari aktivitas kelompok, pelabelan dengan sebutan yang merendahkan, pembatasan akses terhadap layanan pembinaan, serta pengabaian terhadap kebutuhan mereka sebagai manusia yang memiliki hak untuk dibina dan diperlakukan secara adil.

Dalam konteks inilah, teori kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu menjadi penting sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja secara tersembunyi dan bagaimana dominasi berlangsung melalui mekanisme simbolik yang diterima secara “alami” oleh yang didominasi. Kekerasan simbolik menurut Bourdieu adalah bentuk dominasi yang tidak kasat mata, yang bekerja melalui struktur sosial dan budaya yang dilegitimasi oleh semua pihak, termasuk korban itu sendiri. Korban tidak menyadari bahwa mereka sedang didominasi, karena sudah menginternalisasi struktur sosial yang menindas mereka melalui proses panjang yang tertanam dalam pengalaman hidup. Konsep habitus dalam kerangka teori Bourdieu merujuk pada disposisi mental dan sikap tubuh yang terbentuk dari pengalaman sosial individu sejak kecil (Bourdieu, 1977). Habitus adalah hasil dari internalisasi struktur sosial ke dalam diri individu, yang kemudian membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak seseorang secara otomatis dalam konteks sosial tertentu.

Habitus narapidana asusila, yang mungkin sejak awal sudah mengalami stigma sosial di lingkungan mereka, membentuk persepsi bahwa mereka memang “pantas” menerima perlakuan rendah. Akibatnya, ketika mereka diperlakukan secara diskriminatif di dalam Lapas, mereka tidak banyak melakukan perlawanan karena telah terbentuk persepsi inferioritas dalam diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bagaimana kekerasan simbolik dapat bekerja secara efektif melalui struktur sosial yang telah diinternalisasi.

Sementara itu, struktur sosial dalam Lapas dapat dilihat sebagai sebuah arena (*field*), yaitu medan sosial tempat berbagai aktor dengan posisi dan kepentingan yang berbeda saling berinteraksi, bersaing, dan bertarung untuk mendapatkan

pengakuan, kuasa, dan akses terhadap sumber daya (Bourdieu & Wacquant, 1992). Dalam arena ini, narapidana, petugas, dan pihak lain berperan sesuai posisi dan modal yang mereka miliki baik modal sosial, modal budaya, maupun modal simbolik yang menentukan sejauh mana mereka dapat bertahan atau dominan dalam struktur tersebut. Dalam arena ini, narapidana yang memiliki modal lebih tinggi baik modal sosial (jaringan atau kedekatan dengan petugas), modal ekonomi (kemampuan finansial untuk “membeli” fasilitas atau perlakuan khusus), modal budaya (pengetahuan atau kemampuan beradaptasi), maupun modal simbolik (status sosial sebelum dipenjara)—akan menempati posisi yang lebih tinggi. Sementara narapidana asusila cenderung miskin modal, terutama modal simbolik, yang menjadikan mereka mudah dikendalikan dan didominasi secara simbolik.

Kondisi ini diperparah dengan adanya norma tidak tertulis yang berkembang di lingkungan Lapas, di mana terdapat hierarki sosial internal di antara para narapidana itu sendiri. Dalam hierarki ini, narapidana asusila biasanya ditempatkan pada tingkat terendah. Mereka dianggap sebagai “penjahat di antara penjahat,” dan akibatnya menjadi sasaran legitimasi kekerasan dari kelompok narapidana lainnya. Dominasi yang terjadi ini bukan hanya dipaksakan, tetapi juga “diakui” oleh para pelaku dan korban, karena dianggap sebagai hal yang wajar dan bagian dari budaya dalam Lapas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengungkap bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana asusila di Lapas Kelas II A Banyuasin, mengkaji bagaimana proses itu berlangsung dalam relasi sosial di dalam Lapas, serta menganalisis bagaimana kekerasan tersebut diterima, dipahami, dan dimaknai oleh para narapidana itu sendiri. Dengan menggunakan kerangka teori Bourdieu tentang habitus, modal, dan arena, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap praktik kekerasan simbolik dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Penjelasan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana dominasi sosial dipertahankan tidak hanya melalui kekuatan ekonomi atau politik, tetapi juga melalui cara berpikir dan melihat dunia yang secara tidak sadar sudah ditanamkan dalam diri setiap individu sejak awal kehidupannya. Pelaku sosial pun menerima kekerasan simbolik sebagai sesuatu yang wajar karena kekerasan simbolik menggunakan struktur objektif yang ada di dalam dunia sosial dengan

kasus pencabulan ini peneliti menggunakan teori kekerasan simbolik. Peneliti tertarik menguak Bagaimana kehidupan keseharian narapidana asusila selama menjalani hukuman dan bagaimana kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana asusila selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan II A Banyuasin di lembaga pemasyarakatan II A Banyuasin

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekerasan simbolik yang dialami narapidana asusila selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan II A Kabupaten Banyuasin ?. Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kehidupan keseharian narapidana asusila selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan II A Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang di alami oleh narapidana asusila di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Banyuasin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara menyeluruh adalah untuk mengungkap dan memahami secara komprehensif bagaimana kehidupan keseharian narapidana asusila berlangsung selama mereka menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin, dengan memberikan perhatian khusus pada pengalaman sosial, relasi antar individu, serta proses adaptasi terhadap lingkungan pemasyarakatan yang sering kali sarat akan stigma dan perlakuan diskriminatif. selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk :

1. Menganalisis secara kritis kekerasan simbolik sebagaimana dikonsepsikan oleh Pierre Bourdieu beroperasi secara sistematis namun tidak kasatmata dalam praktik sehari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan, melalui mekanisme-mekanisme sosial yang tampak wajar atau dianggap normal oleh pelaku sosial di dalamnya, seperti pembentukan habitus inferior, internalisasi stigma, serta relasi kuasa yang tidak seimbang antara petugas dan narapidana maupun sesama narapidana.

2. Secara khusus penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan realitas kehidupan harian narapidana asusila, serta mengeksplorasi bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang mereka alami, baik yang bersumber dari struktur institusional maupun dari konstruksi sosial yang berkembang di dalam Lapas itu sendiri, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam wacana akademik mengenai sistem pemasyarakatan, kekuasaan simbolik, dan reproduksi ketimpangan sosial di ruang tertutup negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penilaian tentang kehidupan sehari-hari narapidana asusila menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan II A Banyuasin sebagai sebuah sosial di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Banyuasin dan sebagai sumbangsi pengetahuan terhadap pengembangan ilmu Sosiologi
2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan untuk membuat formulasi dan menyusun kebijakan bagi pemerintah dan lembaga terkait mengenai pembinaan terhadap para narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Etry Puspita, 2022 <https://suarapublik.id/saksi-sebut-tewasnya-tahanan-polres-empat-lawang-akibat-dianiaya-oknum-polisi>),
- Harsono, H. S. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.,
- Haryatmoko. (2018). *Etika politik dan kekuasaan*. Jakarta: Gramedia.,
- Hidayat, T. 2011. *Peranan lembaga pemasyarakatan dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.,
- Ife, J. & Tesoriero, F. 2008. *Community Development Alternatif Masyarakat Di Era Globalisasi* (1). Pustaka Pelajar.,
- Ilato, R. 2017. *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*. Malang: Ideas Publishing.,
- Ilham, Arief, H., & Ambasari, N. 2020. *Peran lembaga pemasyarakatan dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana (Studi di lembaga pemasyarakatan Karang Intan)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan.,
- Jumarni. 2019. *Peran Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Watampone dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Jurnal Al-dustur Vol. 2 (2).,
- Jumhur dan Muh. Suryo. 1987. *Bimbingan Dan Penyuluhan di sekolah*. Bandung: CV.,
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4. Mardikanto, T. & Soebiato, P. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (I). Alfabeta.,
- Margolang, N. 2018. *Strategi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani*. Jurnal Agro Riau. Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Riau III (01).,
- Marsana, I. G. A. (2000). *Kekerasan simbolik dalam wacana media massa*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 15–26.,
- Marzuki. 2015. *Pendidikan Karakter Islam*. Jakarta: Amzah.,
- Milen, A. 2001. *What Do We Know About Capacity Building, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*. Geneva: World Health Organization.,
- Moenir. 2002. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Gunung Agung, Jakarta.,
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.,
- Muladi. 1994. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.,
- Nasution, J. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Grasindo, Universitas Sriwijaya

Jakarta.,

- Nugroho, H. (2018). *Problematika Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 45–60.,
- Poerwadarmita. 2004. *bapaks Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.,
- Purnomo, A. 2002. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Jaya, Jakarta.,
- Resworo, G. A. 2022. *Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Magelang*. Amnesti, *Jurnal Hukum* Vol. 4 (1-10).,
- Ricciardelli (2014) dalam “Exposing ‘Sex’ Offenders: Precarity, Abjection and Violence in the Canadian Federal Prison System”.,
- Sanusi, H. 2004. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.,
- Septa, J. 2012. *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di lembaga pemasyarakatan Kelas Ii A Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. Ilmu Pemerintahan, Fisipol UIR.,
- Simanjuntak, S. & Pasaribu H. B. 1990. *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*. Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.,
- Sobur, A. (2009). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.,
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Penganta*. Rajawali Press, Jakarta.,
- Soeprapto, H. R. Riyadi. 2006. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*.,
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri (I)*. Pustaka Pelajar.,
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.,
- UNDP. 2008. *Capacity Assessment Methodology User’s Guide*. Bureau for Development Policy, UNDP.,
- Usman, S. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (IV)*. Pustaka Pelajar.,

Sumber Jurnal :

- Aji, G. R. (2022). Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–10.
- Aulia, R., Dewi, R. S., & Fauzia, R. (2015). Analisis fenomenologi eksistensi narapidana pelaku pembunuhan berencana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ecopsy*, 2(1).
- Bourdieu, P. (1992). An invitation to reflexive sociology. *Polity*.
- Bourdieu, P. (2011). The Forms of Capital. *Cultural Theory: An Anthology*, 1, 81– 93.
- Fernandes, F. L., Swinney, A., McMillan, S., MacLeay, D., McGhee, J., Graham, W., & Roberts, G. (2018). Rehabilitation doxa and practitioner judgment. An analysis of symbolic violence on health care provision in the Scottish prison system. *Ciência & Saúde Coletiva*, 23(9), 2869–2877.
- Gudjonsson, G. H., & Sigurdsson, J. F. (2000). Differences and similarities between violent offenders and sex offenders. *Child Abuse & Neglect*, 24(3), 363–372.

- Gusnita, C. (2017). Kekerasan Simbolik Berita Kriminal di Media Massa. *Deviance, 1*(1), 71–81.
- Haryatmoko, J. (2003). *Etika politik dan kekuasaan*.
- Jespersen, A. F., Lalumière, M. L., & Seto, M. C. (2009). Sexual abuse history among adult sex offenders and non-sex offenders: A meta-analysis. *Child Abuse & Neglect, 33*(3), 179–192.
- Mann, N. (2012). Ageing child sex offenders in prison: Denial, manipulation and community. *The Howard Journal of Criminal Justice, 51*(4), 345–358.
- Martha, A. E., & Khoirunnas, C. (2018). Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan yang Mengalami Label Negatif di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta). *Veritas et Justitia, 4*(2), 388–421.
- Martono, N. (2014). Dominasi Kekuasaan dalam Pendidikan. *Jurnal Interaksi, 8*(1), 28–39.
- Mingus, W., & Burchfield, K. B. (2012). From prison to integration: Applying modified labeling theory to sex offenders. *Criminal Justice Studies, 25*(1), 97–109.
- Noor, A. A., Fauzia, R., & Safitri, J. (2020). Penyesuaian Diri Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru. *Jurnal Kognisia, 3*(1), 62–67.
- Permatasari, O. S. D. (2016). Studi Fenomenologi Mengenai Pengalaman Narapidana Kategori Residivis. *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma*.
- Rachman, A. A. M. I., & Hastri, E. D. (2023). Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Politik Hukum, 1*(1), 1–12.
- Rahman, Z. A. B., Zain, A. M., & Abdul Kadir, F. A. (2013). Victim Empathy Deficits Among Sex Offenders in Kajang Prison. *Islāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies, 35*(1).
- Ricciardelli, R., & Spencer, D. (2014). Exposing ‘sex’offenders: Precarity, abjection and violence in the Canadian federal prison system. *British Journal of Criminology, 54*(3), 428–448.
- Sandra, A., Reinaldo, J., & Stabelini, A. M. (2016). The invisible violence: Symbolic violence and relations of sociability in Brazilian schools. *Journal of Education and Human Development, 5*(4), 237–244.
- Setiawan, H. E., & Sakti, H. (2019). Penemuan makna hidup pada residivis di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang. *Jurnal Empati, 8*(1), 40–48.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- van Den Berg, C., Beijersbergen, K., Nieuwbeerta, P., & Dirkzwager, A. (2018). Sex offenders in prison: Are they socially isolated? *Sexual Abuse, 30*(7), 828–845.
- Wirzahayati, D. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lapas Medium Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. *Journal of Sharia and Law, 2*(2), 452–469.